



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KESEPAKATAN BILATERAL DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA - MALAYSIA

Simela Victor Muhamad
Analisis Legislatif Ahli Utama
simela.muhamad@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), ke Malaysia pada minggu pertama Juni 2023 menghasilkan sejumlah kesepakatan bilateral. Kesepakatan tersebut, di antaranya, berkaitan dengan perbatasan laut kedua negara di Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi. Lawatan Presiden ke Negeri Jiran itu sebagai balasan atas kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, Januari lalu ke Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya seusai dilantik selaku PM. Khusus perbatasan laut, kesepakatan tersebut dicapai setelah kedua negara melakukan perundingan selama 18 tahun. Nota kesepahaman tentang perbatasan Selat Malaka bagian selatan dan Laut Sulawesi ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dan Menlu Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir.

Selain itu, ditandatangani pula nota kesepahaman terkait dengan perjanjian lintas batas, perjanjian perdagangan perbatasan, sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi. Perjanjian lintas batas ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Mendagri Malaysia Dato' Seri Saifuddin Nasution. Adapun perjanjian perdagangan perbatasan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pelaburan, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz. Sementara itu, nota kesepahaman untuk sertifikasi halal ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI Muhammad Aqil Irham dan Ketua Pengarah Kemajuan Islam Malaysia Datuk Hakimah Mohd Yusoff. Nota Kesepahaman Kerja Sama Promosi Investasi dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan Menteri Pelaburan, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz. Berbagai kesepakatan bilateral yang dicapai oleh Indonesia dan Malaysia tersebut diakui oleh Jokowi dan Anwar sebagai buah dari hubungan baik di antara mereka, layaknya sahabat dan saudara dekat. Lebih lanjut, untuk isu perbatasan, Presiden Jokowi berharap negosiasi perbatasan di wilayah daratan juga dapat segera diselesaikan. Nota kesepahaman yang diharapkan segera selesai itu termasuk masalah perbatasan segmen Sebatik dan segmen Sinapat-Sesai di Kalimantan. Kedua pihak bertekad untuk menyelesaikan isu perbatasan darat itu paling lambat pada Juni 2024.

Jokowi dan Anwar juga membicarakan isu perlindungan pekerja migran Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi komitmen PM Anwar untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia dan penegakan hukum yang adil bagi pekerja Indonesia. Isu itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam kunjungan Anwar ke Indonesia, Januari lalu. Terkait isu pekerja migran Indonesia, kedua pihak sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia. Masih terkait dengan isu pekerja migran Indonesia, Presiden Jokowi kembali mendorong terwujudnya pembangunan pusat belajar komunitas (*community learning center*) di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Warga Indonesia yang berada di Depo Imigrasi diharapkan juga dapat segera dipulangkan. Presiden juga meminta agar implementasi sistem satu kanal untuk perekrutan dan penempatan pekerja Indonesia harus dioptimalkan.

Presiden Jokowi kepada PM Anwar juga mendorong kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan komoditas lainnya dari Uni Eropa (UE) untuk terus diperkuat. UE mulai pertengahan Mei lalu memberlakukan Undang-Undang Uni Eropa soal Deforestasi (EU Deforestation Regulation/EU-DR). Dengan aturan itu, UE melarang impor berbagai komoditas terkait deforestasi, termasuk minyak sawit dan produk turunannya. Indonesia dan Malaysia adalah penghasil 85 persen sawit dunia. Pekan lalu, kedua negara mengirim tim bersama ke Brussels guna mencari penyelesaian dengan UE.

Selain nota kesepahaman yang tertulis, kedua pemimpin juga membicarakan kerja sama yang tidak tercatat dalam nota kesepahaman, seperti kerja sama antara polisi Indonesia dan Malaysia serta kerja sama di bidang pertahanan. Selain itu, kedua negara juga akan meningkatkan kerja sama bidang kebudayaan, pendidikan, hingga dakwah Islam.

Atensi DPR

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat perlu menjadi perhatian DPR, terlebih dengan negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia di wilayah laut dan daratan, serta memiliki sejumlah persoalan bersama yang perlu diatasi melalui kerja sama. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi I DPR perlu ikut mengawal dan memastikan agar berbagai kesepakatan bilateral yang telah dicapai oleh Indonesia dan Malaysia saat kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Komisi I DPR juga perlu ikut mengawal agar negosiasi perbatasan di wilayah daratan antara Indonesia dan Malaysia yang belum selesai dapat segera diselesaikan, termasuk masalah perbatasan segmen Sebatik dan segmen Sinapat-Sesai di Kalimantan. Komisi I DPR juga perlu ikut mengawasi implementasi kerja sama Indonesia – Malaysia yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia, mendukung penguatan kolaborasi Indonesia – Malaysia untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dari Uni Eropa, serta mendukung berbagai upaya peningkatan kerja sama bilateral lainnya.

Sumber

kemlu.go.id., 8 Juni 2023;

Kompas, 9 Juni 2023;

Media Indonesia, 9 Juni 2023;

Republika, 10 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.